

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab terakhir ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan mengenai efektifitas pembinaan guru SD Kodya Bandung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok.

1. Pembinaan profesional guru SD Kodya Bandung di tingkat wilayah dilaksanakan oleh dua instansi, yaitu oleh Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Wilayah Jawa Barat dan Dinas P dan K DT I Jawa Barat (Jabar). Pembinaan yang dilaksanakan Depdikbud Wilayah Jabar dilakukan melalui kegiatan rapat Kasi Dikdas se propinsi, penataran profesional, lomba guru teladan, lomba bidang studi serta publikasi media. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan Dinas P dan K DT I Jabar, dilakukan melalui penyetaraan D2 PGSD, penataran wawasan IPTEK, penataran muatan lokal dan penataran Calistung. Dualisme pembinaan tersebut mengakibatkan terjadinya orientasi dan manajemen pembinaan yang tidak jelas, yang melahirkan berbagai kondisi penyebab kurang efektifnya pembinaan profesional guru SD tersebut, seperti : terjadinya kompetisi kurang sehat antara pelaksana pembinaan,

pengkoordinasian pembinaan yang sulit, terjadinya upaya pembinaan yang bersifat pragmatikal, partikular, dan tambahan sulam. Dualisme pembinaan akibat kurang mampunya atau keengganan kedua instansi menerjemahkan kebijaksanaan yang ada, disamping kekakuan birokrasi pengurusan guru SD, secara keseluruhan menyebabkan pembinaan profesional guru menjadi kurang efektif. Pembinaan kurang berpengaruh bagi perubahan perilaku mengajar guru di kelas dan perilaku profesional guru umumnya. Terutama pembinaan yang dilakukan Dinas P dan K DT I Jabar, bila dilihat dari efisiensi waktu, tempat, tenaga, biaya, kesesuaian materi maupun tingkat kepuasan pembina dan terbina tampak kurang efektif.

Dilihat dari jenis pembinaannya, terdapat keragaman efektifitas pembinaan yang dilakukan pada tingkat wilayah. Pembinaan yang dirasakan paling efektif adalah kunjungan daerah dan rapat Kasi se propinsi. Kedua sistem pembinaan tersebut dirasakan dapat melahirkan komunikasi vertikal dua arah relatif dialogis antara pembina dan sasaran binaan. Selanjutnya sistem pembinaan berbentuk penataran, seperti penataran profesional, CBSA, Calistung, dsb. menunjukkan tingkat relevansi cukup tinggi dengan kebutuhan guru sehari-hari, sehingga dirasakan bermanfaat bagi guru. Sedangkan sistem pembinaan melalui berbagai lomba dan media serta penataran muatan lokal dan wawasan IPTEK dirasa kurang memberi manfaat

bagi peningkatan kualitas mengajar guru, karena beberapa alasan sosio-kultural yang secara dominan melihat pada diri guru itu sendiri, serta tingkat relevansinya yang rendah.

2. Pembinaan profesional guru SD Kodya Bandung di tingkat Kodya dilaksanakan oleh seksi pendidikan dasar. Dinas DT II hanya terlibat dalam rekrutmen guru yang akan dibina, meskipun sejak tahun 1990 Dinas P dan K DT II Kodya Bandung memiliki otonomi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Ketidakmampuan pemberi otonomi memahami kondisi penerima otonomi disamping kurang siapnya penerima otonomi menerjemahkan pembinaan dan mencari dana untuk membiayai program pembinaan merupakan penyebab kurang berfungsinya Dinas P dan K DT II Kodya melakukan pembinaan profesional guru SD di wilayahnya.

Pembinaan yang dilaksanakan Depdikbud Kodya Bandung terdiri dari dua sistem pembinaan, yaitu sistem pembinaan profesional (SPP) melalui wadah KKPS dan model non SPP (pembinaan sistem "konvensional") melalui penataran profesional serta berbagai lomba yang rutin dilaksanakan. Dualisme pembinaan tersebut, yaitu sistem SPP dan non SPP, cenderung diakibatkan kurang mampunya aparat pembina menerjemahkan sistem pembinaan profesional, disamping terdapatnya sikap kurang berani dan enggan pihak penyelenggara melakukan pembaruan dalam pembinaan.

Pembinaan non-SPP yang dilakukan melalui penataran dirasakan memiliki manfaat besar bagi peningkatan profesional guru dikarenakan tingkat relevansi materi penataran dengan kebutuhan mengajar guru sehari-hari relatif tinggi serta komunikasi dialogis dan dimanis yang berkembang dalam proses penataran berlangsung. Sebaliknya, pembinaan non-SPP berupa berbagai jenis lomba dirasakan guru tidak memberi kontribusi yang berpengaruh bagi perbaikan kualitas mengajar guru di kelas khususnya dan kualitas hidup guru umumnya. Pembinaan SPP melalui KKPS sebagai wadah pembinaan profesional merupakan forum koordinasi dan konsultasi untuk membina kesamaan persepsi, orientasi dan dasar pijakan pembinaan antara penilik, kepala sekolah dan guru, dirasakan sangat berguna bagi pembinaan profesional guru umumnya. Hal tersebut karena melalui wadah ini akan ditemukan secara terus menerus model pembinaan yang tepat bagi kepala sekolah dan guru.

3. Pada tingkat kecamatan, pembinaan profesional guru SD dilakukan oleh Depdikbudcam, yang ditempuh melalui dua sistem pembinaan. **Pertama**, melalui sistem yang bersifat umum yang meliputi pembinaan SPP dan non-SPP. Pembinaan melalui sistem non-SPP yang ditempuh melalui penataran dirasakan memiliki efektifitas cukup berarti, sebaliknya berbagai lomba yang diselenggarakan dinilai kurang menyentuh kebutuhan pengembangan profesional guru. Sedangkan pembinaan melalui SPP yang dilakukan melalui

wadah KKG, KKKS dan PKG, memiliki tingkat efektifitas yang beragam. Yang tergantung pada letak geografi sekolah, motivasi guru, tuntutan masyarakat, kemampuan pembina memobilisasi kegiatan serta kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan pembinaan SPP ini, ternyata terdapat hubungan tingkat efektifitas antara KKG dengan KKKS maupun PKG. KKG efektif umumnya berkaitan dengan KKKS dan PKG yang efektif. Bila KKGnya efektif, maka KKKS dan PKGnya pun efektif.

Kedua, pembinaan melalui sistem yang bersifat khusus, yaitu pembinaan guru yang dilakukan oleh penilik dan kepala sekolah. Sistem ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi peningkatan profesional guru, dikarenakan beberapa faktor. Kekurang fahaman penilik dan kepala sekolah akan peran dan fungsinya sebagai pembina secara komprehensif dan adanya hubungan yang seringkali sangat kaku dan birokratis merupakan faktor dominan penyebab kurang efektifnya pembinaan profesional guru yang dilakukan secara khusus oleh penilik dan kepala sekolah.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan pokok-pokok/kesimpulan hasil penelitian, dapatlah dirumuskan beberapa rekomendasi.

1. Diperlukan adanya perumusan yang jelas mengenai konsep

dasar pembinaan profesional guru SD. Kejelasan konseptual tersebut diperlukan sebagai pijakan perumusan bagi penyusunan manajemen pembinaan profesional guru yang tepat dan terpadu.

2. Diperlukan peninjauan kembali (remodifikasi) terhadap perundang (peraturan) yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan SD umumnya dan pembinaan guru khususnya. Hal tersebut mengingat bahwa kondisi perundangan/peraturan yang kurang memadai -- dalam arti kurang mengandung kejelasan, kepastian, dan daya jelas konseptual yang tinggi disamping memiliki kemudahan dan ketunggalan penafsiran yang tidak memandegkan kreatifitas pengembangannya. seperti banyak terjadi hingga sekarang ini-- melahirkan ketidak beresan dalam implementasinya. Sebaliknya, terdapatnya perundangan/peraturan yang memadai, disamping mengakibatkan kejelasan orientasi dan mekanisme pelaksanaannya juga secara praktis melahirkan tingkat produktifitas kerja secara maksimal sesuai apa yang diharapkan.
3. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pembinaan guru antara lembaga pendidikan guru, -- (tidak saja berperan sebagai pemberi pendidikan prajabatan, namun juga perlu memberi pendidikan lanjutan), organisasi birokratis pengguna guru serta organisasi guru -- terutama dalam membentuk wadah kerjasama mengatasi problema pengguna sehari-hari. Kerjasama dan koordinasi

tersebut dilaksanakan agar hasil pembinaan sesuai perkembangan IPTEK, mekanisme birokrasi yang ada dan sesuai dengan tuntutan guru itu sendiri.

4. Diperlukan adanya pelatihan yang intensif dan komprehensif tentang analisis kebijakan bagi para pembuat keputusan pendidikan, baik di tingkat wilayah maupun kota madya. Pelatihan tersebut diperlukan untuk memberi wawasan, pengetahuan maupun kompetensi profesional bagi para pembuat keputusan (*decision makers*), sehingga pada tingkat konseptual maupun operasional mereka diharapkan mampu menganalisis kebijakan serta merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan program. Dengan demikian, diharapkan selanjutnya tidak akan pernah terjadi (terdapat) suatu kasus program yang bersubstansi tumpang tindih, kurang jelas pijakan dan orientasinya serta mekanisme pelaksanaan yang sulit terkoordinasi dan terkontrol.
5. Diperlukan upaya penyadaran yang intensif berbagai pihak yang terkait dengan pembinaan guru akan pentingnya peningkatan kualitas guru SD. Hal tersebut karena semakin tinggi kesadaran kolektif tentang perlunya pembinaan guru dapat menumbuhkembangkan komitmen dan tanggung jawab pembina profesional guru SD untuk memprioritaskan implementasi pembinaan seefektif mungkin. Dalam rangka ini, pihak pemerintah -- dalam hal ini Depdikbud maupun

Depdagri pada tingkat DT I maupun DT II -- perlu meningkatkan koordinasi yang proporsional dan intensif yang didasarkan pada orientasi tujuan yang sama, yakni meningkatkan profesional guru SD. Tanpa adanya koordinasi kedua pihak, sebaliknya, mengakibatkan terjadinya inkoordinasi program pembinaan yang dapat menghasilkan upaya pembinaan profesional guru yang dilakukan menjadi kurang bahkan tidak efektif.

6. Pengembangan pembinaan profesional guru hendaknya diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan dasar yang dirasakan guru itu sendiri. Pendekatan pembinaan guru "dari bawah ke atas" merupakan cara strategis untuk diterapkan. Suara guru tentang apa yang diperlukan dan bagaimana cara memenuhinya tentang kebutuhan apa yang dirasakan di lapangan dan bagaimana cara pemenuhannya perlu didengarkan atau dipertimbangkan. Sedangkan pendekatan pembinaan profesional guru yang bersifat "dari atas ke bawah" sudah saatnya direformulasi atau dimodifikasi bentuk dan mekanismenya, sehingga sesuai dengan kebutuhan pembinaan profesional yang dirasakan guru itu sendiri, yang pada akhirnya menghasilkan pembinaan yang efektif.

7. Diperlukan suatu analisis jabatan penilik dan kepala sekolah yang jelas dan tegas. Hal tersebut mengingat bahwa kenyataan di lapangan terkesan belum adanya penyerahan tanggung jawab sepenuhnya kepada penilik dan

kepala sekolah tentang pembinaan profesional guru yang harus dilakukannya. Akibat belum adanya pemberian tanggung jawab jelas dan tegas bagi kedua kelompok pembina tersebut, mengakibatkan tumbuhnya sikap gamang untuk melakukan perubahan-perubahan dalam upaya perbaikan pembinaan profesional guru itu sendiri. Untuk mencapai ini hendaknya para pembuat kebijakan pendidikan perlu memiliki kompetensi memadai yang mampu mereformulasi dan menganalisis tugas dan tanggung jawab penilik serta kepala sekolah secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan guru bagi penilik dan kepala sekolah tanpa membatasi secara kaku kewenangan mereka sebagai pedoman untuk merekrut para penilik dan kepala sekolah sesuai kualifikasi yang disyaratkan dalam analisis jabatan.

8. Diperlukan program latihan bagi para penilik dan kepala sekolah. Program latihan ini menjadi sangat penting artinya bagi penilik dan kepala sekolah. Melalui program ini diharapkan mereka memiliki berbagai kompetensi profesional yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab -- seperti tercantum dalam deskripsi kerjanya, misalnya kompetensi untuk 1) memahami tugas dan tanggung jawabnya secara komprehensif, 2) mengidentifikasi masalah/kebutuhan pembinaan guru yang dirasakan, 3) menyusun program pembinaan guru yang sesuai dengan masalah yang

ada dan dapat dilakukan, 4) melaksanakan program pembinaan yang telah disusunnya dan melakukan, 5) penilaian terhadap hasil pembinaan serta, 6) menetapkan aktifitas tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya. Dalam rangka program ini, Depdikbud hendaknya menyusun rencana program latihan secara intensif, kontinu, baik berupa program jangka pendek maupun program jangka panjang. Oleh sebab itu program-program seperti lokakar-ya, kursus (*short course*) dalam bidang administrasi pendidikan, maupun program pendidikan jangka panjang, seperti program D3/SI. Penilik dan kepala sekolah perlu diintensifkan penyelenggaraannya.

9. Perlu adanya pengangkatan para penilik dan kepala sekolah lebih selektif berdasarkan kriteria kualifikasi yang dituntut secara tegas. Hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat peranan dan fungsi penilik dan kepala sekolah sangat determinatif bagi efektifitas pembinaan profesional guru SD yang di bawahnya. Untuk ini, pihak yang berwenang perlu bersifat objektif dalam proses rekrutmen penilik dan kepala sekolah, sehingga secara langsung tidak langsung mencipta kondisi yang kondusif dalam pembinaan profesional guru SD itu sendiri. Rekrutmen yang tidak dilaksanakan secara objektif atau rekrutmen yang tidak didasarkan pada seleksi yang ketat disamping mengakibatkan duduknya penilik dan kepala sekolah yang secara profesional kurang kompeten sehingga tidak mampu

mengemban tugas dan tanggung jawabnya, lebih jauh juga menyebabkan pembinaan profesional guru SD tidak efektif.

10. Perlu pengembangan wadah pembinaan profesional guru SD secara memadai. Diketahui dalam hasil penelitian wadah pembinaan profesional guru SD di Kodya Bandung seperti KKG, KKKS, KKPS, PKG mempunyai peran fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pembinaan profesional guru SD. Karena itulah pihak yang terkait hendaknya secara aktif, kreatif dan kontinu mencari dan mengembangkan cara-cara atau strategi pengembangan wadah tersebut. Dalam rangka ini pihak terkait mungkin dapat melakukan berbagai aktifitas, misalnya : 1) menjalin kerjasama antara sekolah dengan orang tua murid atau masyarakat luas, sehingga terbentuk solidaritas fungsional yang akrab, yang dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri, 2) melakukan koordinasi dan konsolidasi antar berbagai wadah pembinaan, pembina yang terkait dan anggota secara baik, sehingga terjadi hubungan yang kompak dan terarah, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembinaan profesional guru yang efektif, 3) melakukan penggalan dana melalui berbagai kegiatan dalam rangka membiayai aktifitas pembinaan yang diselenggarakan wadah-wadah tersebut, serta 4) meningkatkan kesadaran para guru SD sebagai anggota wadah profesional untuk secara aktif berpartisipasi dan memanfaatkan

wadah-wadah yang tersedia tersebut sebagai sarana/media pengembangan/ peningkatan kualitas profesionalnya sebagai guru.

Demikianlah pembahasan, penyimpulan dan rekomendasi dibuat penulis, dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi penulis khususnya dan bagi pengembangan pembinaan profesional guru pada umumnya. Dan, terakhir penulis panjatkan puji syukur pada Allah atas segala rachmat yang Ia limpahkan pada penulis sehingga karya ini terselesaikan. Alhamdulillah.

